

PENENTUAN PRIORITAS KEBIJAKAN PERKERETAAPIAN NASIONAL

Mohammad Okki Hardian¹

Anang Zaini Gani²

Sutarman³

¹*Teknik Industri, Universitas Gunadarma*

²*Teknik Industri, Institut Teknologi Telkom*

³*Teknik Industri, Universitas Pasundan*

¹*okki_hardian@yahoo.com*

Abstrak

Pembangunan perkeretaapian di Indonesia saat ini telah memasuki tahapan baru dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pemberlakuannya mempunyai dampak yang sangat besar terhadap penyelenggaraan perkeretaapian, bukan hanya pada tataran operasional tetapi juga pada aspek kelembagaan dan kebijakan. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi sistem perkeretaapian nasional, maka diperlukan adanya penentuan prioritas kebijakan. Tulisan ini mencoba merumuskan prioritas kebijakan perkeretaapian nasional yang sebaiknya diambil dalam penerapan UU No 23 Tahun 2007. Penentuan prioritas kebijakan tersebut berdasarkan atas pendapat pakar dan diolah menggunakan metode AHP. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kebijakan yang mendapatkan prioritas terbesar adalah peningkatan keselamatan dan keamanan perjalanan KA, diikuti oleh standarisasi sarana dan prasarana KA. Para pakar memilih kebijakan tersebut sebagai prioritas karena dampaknya yang signifikan dan berdampak jangka panjang. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua bidang, yaitu memperkaya tulisan tentang kebijakan perkeretaapian serta memberikan masukan bagi Ditjen KA dalam penyusunan regulasi maupun kebijakan perkeretaapian.

Kata kunci : kebijakan, perkeretaapian, prioritas, AHP, UU No 23 Tahun 2007

PRIORITY DETERMINATION OF NATIONAL TRAINY

Abstract

Railway development in Indonesia opens a new chapter with the release of Act Number 23 Year 2007 on Railway. Its impact is immense; not only on operational level, but also on institutional and policy level. If we consider the complex environment in national railway system, it is essential to formulate policies priority. This paper attempts to decide which policies constitute higher priority which should be taken on the implementation of the Act. The decision is made based on expert opinion using AHP technique. The analysis result shows that biggest priority should be given to improvement on safety and security of train trips. Second biggest being standardization of train and railway infrastructure technology. The experts select those policies among others based on their significant and long term impact. This paper expects to contribute to two fields; one is in academic transportation policy study and the other is to give advice to Railway Directorate General as policy maker and regulatory body in Indonesia railway system.

Keywords : *policy, railway, priority, AHP, Act Number 23 Year 2007*